

Literature Review: Implementasi Basis AkruaI dalam Akuntansi Sektor Publik: Tantangan dan Solusi

Alfaturrahmah^{1*} | Kaela Astri Febriana¹ | Syifa Aulia¹

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Correspondence Email:
alfaturrahmah@student.budiluhur.ac.id*

Kata Kunci:
Basis AkruaI; Akuntansi Sektor Publik; Laporan Keuangan Pemerintah; Transparansi; Reformasi Keuangan.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik, terutama di pemerintah Indonesia. Peralihan dari model kas ke model akrual adalah bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akrual, seperti kesiapan tenaga kerja, sistem informasi, dan komitmen manajemen. Selain itu, juga dijelaskan berbagai keuntungan yang diharapkan, termasuk peningkatan kualitas laporan keuangan dan pembuatan keputusan yang lebih berbasis data akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis regulasi yang relevan, literatur, dan implementasi di beberapa instansi pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai rintangan, penerapan akuntansi berbasis akrual bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan tata kelola pemerintah jika didukung oleh pelatihan terus-menerus, pembaruan sistem, dan penguatan komitmen institusi.

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola keuangan di sektor publik menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan relevan. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini mulai diadopsi secara bertahap sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan secara efektif diterapkan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah mulai tahun 2015 (Rahayu et al., 2023). Transformasi menuju basis akrual ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi keuangan negara yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan pemerintahan.

Akuntansi berbasis akrual sendiri merupakan metode pencatatan keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhitungkan kapan kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, sistem ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang belum terealisasi secara kas. Hal ini berbeda dengan sistem berbasis kas yang selama ini digunakan, di mana pencatatan hanya dilakukan ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, sehingga seringkali tidak memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan pemerintah (Alhawtmeh et al., 2023).

Penerapan akuntansi berbasis akrual telah menjadi tren secara global di berbagai negara maju dan berkembang. Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru terbukti berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik setelah mengadopsi sistem ini (Saraite-Sariene et al., 2020). Laporan International Monetary Fund (IMF, 2018) bahkan menegaskan bahwa basis akrual memungkinkan

pemerintah untuk mengidentifikasi beban keuangan jangka panjang yang seringkali tersembunyi dalam sistem berbasis kas, sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai terkait sistem ini (Hernita et al., 2021). Banyak aparatur pemerintah, khususnya di tingkat daerah, belum sepenuhnya menguasai konsep dan aplikasi akuntansi akrual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata dan sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi juga menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan sistem ini secara efektif (Thuan et al., 2022).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang selama ini sudah terbiasa menggunakan sistem lama. Perubahan paradigma dan proses bisnis yang signifikan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan penolakan, baik dari kalangan internal pemerintah maupun pemangku kepentingan eksternal (Silva et al., 2023). Penelitian Gonçalves et al. (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi baru sangat dipengaruhi oleh dukungan dan komitmen dari pimpinan institusi, auditor, serta seluruh pihak terkait. Selain faktor internal, hambatan eksternal seperti keterbatasan regulasi pendukung, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pelatihan juga turut memperlambat proses adopsi sistem akrual di lingkungan pemerintahan. Padahal, tanpa adanya dukungan kebijakan yang kuat dan upaya peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, manfaat optimal dari sistem akrual tidak akan dapat dirasakan secara menyeluruh (Hubbart, 2022).

Meski demikian, berbagai studi telah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara konsisten dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik, baik dalam hal transparansi, akurasi, relevansi, maupun keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar entitas pemerintah (Kanapickiene & Keliuotyte-Staniulieniene, 2019; Dokas et al., 2023). Informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akrual juga lebih relevan untuk pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja keuangan pemerintah (Pina et al., 2020; Huy & Phuc, 2022). Meskipun implementasi basis akrual dalam akuntansi sektor publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk mengatasinya harus terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, sosialisasi yang efektif, serta penguatan kebijakan dan komitmen pimpinan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan reformasi sistem akuntansi di sektor publik. Pada akhirnya, sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan literature review sebagai metode utama untuk menganalisis pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik di Indonesia. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai temuan, tren, serta kesenjangan penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan laporan resmi pemerintah yang diterbitkan pada rentang waktu 2019 hingga 2024. Sumber literatur dikumpulkan melalui berbagai database akademik terkemuka seperti Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect guna memastikan bahwa referensi yang digunakan telah melalui proses peer-review dan memiliki kredibilitas tinggi.

Kriteria seleksi literatur didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu relevansi topik dengan implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik, metode penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut, serta kesesuaian konteks dengan kondisi pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia

maupun negara lain yang telah mengadopsi sistem serupa. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis untuk mengevaluasi bagaimana penerapan basis akrual berdampak terhadap transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi selama proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan organisasi.

Studi ini juga mengkaji berbagai solusi yang telah diusulkan atau diterapkan di berbagai negara dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk konteks Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan literature review yang komprehensif dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi akuntansi berbasis akrual, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. Selain menyoroti manfaat dan dampak positif sistem akrual, kajian ini juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan, penguatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

No.	Author	Judul	Temuan
1.	Reni Dwi Agustin, dan Achmad Subardjo	Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik	Penelitian ini mengkaji penerapan konsep <i>value for money</i> sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja layanan di sektor publik, dengan fokus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2.	Irmayani Ardila, dan Ade Ayu Putri	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan pendekatan <i>value for money</i> , berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup optimal dalam mendukung operasional dan layanan publik.
3.	Putu Agus Erawan, Made Sudarma Santosa, Dewa Ketut Budiarta, dan I Putu Wahyudi	Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng	Penelitian ini menelaah penerapan <i>value for money</i> dalam menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan evaluasi yang lebih objektif dan menyeluruh, serta berguna untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan layanan publik.
4.	K. Matondang, A. A. Parawanza,	Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja sektor publik di Kabupaten Dairi tahun

No.	Author	Judul	Temuan
	J. P. Simanjuntak, dan Y .Tampubolon	Dengan Menggunakan Pendekatan Value Of Money Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 Dan 2024	2023–2024 tergolong baik berdasarkan pendekatan <i>value for money</i> , dengan tercapainya aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penggunaan anggaran dinilai optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara maksimal [Matondang, K. et al., 2025].
5.	I. P. Nurafifah, Haliah, dan Nirwana	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2019–2021 cukup baik berdasarkan pendekatan <i>value for money</i> , dengan pengelolaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif. Temuan ini mendukung penggunaan <i>value for money</i> sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah.
6.	M. P. Prameswari, R. A. Safitri, N. Karima, dan A. Gunawan	Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022)	Penelitian ini menilai kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan menggunakan pendekatan <i>value for money</i> pada kegiatan 2018–2019 seperti Batik Night Market dan pelatihan ekspor. Hasilnya menunjukkan pengelolaan anggaran tergolong ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga memenuhi prinsip <i>value for money</i> .
7.	H. A. Siregar	Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money Dalam Konteks New Public Management Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau	Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau melalui pendekatan <i>value for money</i> dalam kerangka <i>New Public Management</i> . Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mendukung pembangunan daerah.

Pembahasan

Peningkatan Transparansi. Implementasi akuntansi berbasis akrual memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterbukaan dalam laporan keuangan sektor publik. Sistem ini mencatat seluruh transaksi keuangan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kewajiban yang muncul selama periode pelaporan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih akurat dan terkini, termasuk kewajiban jangka panjang serta aset yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem berbasis kas (Alhawtmeh et al., 2023; Safari et al., 2024).

Keterbukaan merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi sistem pelaporan keuangan pemerintah. Melalui basis akrual, setiap transaksi seperti piutang, utang, dan aset tetap dicatat berdasarkan waktu terjadinya, bukan semata-mata saat terjadi arus kas. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan pemerintah, sehingga masyarakat, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi yang lebih transparan dan andal (Kanapickiene & Keliuotyte-Staniulieniene, 2019). Kejelasan dalam pelaporan tersebut turut memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, karena pemerintah tidak dapat lagi menunda atau menyembunyikan kewajiban yang belum diselesaikan, seperti yang kerap terjadi dalam sistem berbasis kas (Carlo et al., 2019).

Tingkat transparansi yang lebih tinggi juga memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang lebih rinci, terutama terkait kewajiban dan aset, membantu pemerintah merancang kebijakan fiskal jangka panjang secara lebih bertanggung jawab. Penelitian oleh Kanapickiene dan Keliuotyte-Staniulieniene (2019) menunjukkan bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat pengawasan sosial terhadap penggunaan dana negara.

Namun, peningkatan transparansi ini tidak lepas dari tantangan, khususnya terkait kompleksitas data yang disajikan. Pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari pengguna laporan, baik internal pemerintah maupun masyarakat umum. Mähönen et al. (2020) menegaskan bahwa tanpa peningkatan literasi akuntansi dan pelatihan yang memadai, informasi dari sistem akrual berisiko menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sosialisasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar manfaat transparansi benar-benar dapat diwujudkan. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi berbasis akrual telah membawa perubahan signifikan dalam hal transparansi laporan keuangan pemerintah. Agar transparansi ini berdampak positif secara maksimal, diperlukan dukungan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem informasi akuntansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengawasi laporan keuangan publik. Dengan demikian, tujuan utama reformasi akuntansi sektor publik, yakni menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, dapat tercapai secara optimal.

Peningkatan Akuntabilitas. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran sesuai waktu terjadinya transaksi, pemerintah dapat menyajikan laporan yang lebih lengkap dan transparan terkait penggunaan sumber daya publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berbeda dengan sistem kas yang hanya mencatat transaksi saat terjadi arus kas, yang sering kali mengabaikan kewajiban dan aset yang belum terwujud dalam bentuk kas, sehingga menimbulkan ketidakakuratan laporan keuangan serta menurunkan tingkat akuntabilitas.

Studi oleh Cao et al. mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi akrual mampu menekan praktik-praktik yang tidak akuntabel, seperti penundaan pencatatan utang dan pengelolaan kewajiban yang tidak transparan. Dalam sistem akrual, semua kewajiban harus dicatat pada saat muncul, sehingga tidak ada ruang untuk menyembunyikan utang demi memperbaiki citra keuangan secara manipulatif. Dengan demikian, penerapan sistem ini mendorong terciptanya budaya pengelolaan keuangan yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab di semua tingkat pemerintahan.

Namun, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, dibutuhkan keahlian teknis dari para pejabat keuangan dan auditor dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Keahlian tersebut mencakup kemampuan mencatat, melaporkan, serta menganalisis laporan keuangan yang lebih kompleks. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem akrual dapat menimbulkan laporan yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga justru menghambat tercapainya akuntabilitas yang diharapkan.

Selain itu, penguatan fungsi audit internal maupun eksternal menjadi elemen penting dalam menjamin akuntabilitas. Audit yang dilakukan secara efektif mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian,

kesalahan, atau potensi penyimpangan dalam laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian oleh Onofrei et al. menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem akuntansi berbasis akrual dan audit yang ketat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Kendati demikian, tantangan dalam peningkatan akuntabilitas juga muncul dari adanya resistensi terhadap perubahan serta kurangnya dukungan dari pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari seluruh jenjang pemerintahan, terutama pimpinan daerah dan nasional, sangat diperlukan untuk mendorong penerapan sistem akuntansi akrual secara konsisten dan berkelanjutan. Di samping itu, penyediaan pelatihan berkelanjutan serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pencatatan akrual secara efektif juga menjadi syarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang tinggi.

Relevansi Informasi Keuangan. Informasi keuangan yang diperoleh melalui penerapan metode akrual memiliki tingkat relevansi yang jauh lebih tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor publik bila dibandingkan dengan metode berbasis kas. Dengan metode akrual, pemerintah dapat mengakses data keuangan yang lebih komprehensif dan tepat mengenai aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dilaksanakan, serta pendapatan dan beban yang terjadi dalam periode tertentu. Hal ini memberikan peluang bagi pembuat kebijakan untuk merencanakan dan mengelola kebijakan fiskal secara lebih efisien dan berkelanjutan (Pina et al. , 2020). Informasi yang lebih relevan ini memberikan gambaran nyata mengenai keadaan keuangan pemerintah, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko fiskal, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan menentukan prioritas dalam anggaran lebih tepat.

Penelitian oleh Huy dan Phuc (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka dapat melakukan perencanaan anggaran dengan lebih terstruktur dan akurat karena didukung oleh data keuangan yang mencerminkan situasi sebenarnya, termasuk kewajiban yang belum dilunasi dan aset yang dimiliki. Ini berdampak positif pada peningkatan efisiensi penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, tidak semua lembaga pemerintah dapat memanfaatkan informasi keuangan berbasis akrual dengan sebaik-baiknya. Kendala teknologi informasi dan kurangnya infrastruktur sistem akuntansi masih menjadi hambatan utama dalam pengolahan serta penyajian data akrual yang rumit (Thuan et al. , 2022). Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki pengetahuan dalam akuntansi berbasis akrual juga menghambat pemanfaatan informasi keuangan secara maksimal. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang konsep akrual menyebabkan beberapa lembaga mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan dan menggunakan data tersebut untuk keputusan strategis.

Selain itu, kompleksitas data yang dihasilkan dari sistem akrual membutuhkan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan ramah pengguna, sehingga informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pihak berkepentingan, termasuk pejabat pemerintah, auditor, dan masyarakat umum. Tanpa dukungan teknologi yang memadai dan peningkatan kapasitas SDM, informasi yang disajikan dapat menjadi kurang efektif dan membingungkan, sehingga menurunkan manfaatnya dalam pengambilan keputusan (Mähönen et al. , 2020).

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan pelatihan yang berkesinambungan bagi aparatur pemerintah sangat penting untuk menjamin bahwa informasi keuangan berbasis akrual dapat digunakan secara optimal. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan mutu pengelolaan keuangan publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan. Salah satu keuntungan utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mencatat dan melacak semua transaksi keuangan dengan lebih tepat, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang terjadi pada periode yang berjalan (Lim dan Nam, 2023; Safari

et al. , 2024). Dengan data yang lebih jelas dan real-time, pemerintah bisa mengidentifikasi area pengeluaran yang bisa dihemat serta menemukan peluang untuk mengoptimalkan aset yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya, aset yang tidak produktif dapat dikenali dan dialihkan atau dijual untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik dan memperbaiki arus kas pemerintah.

Selain itu, sistem akrual memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kebutuhan likuiditas serta keadaan keuangan pemerintah secara keseluruhan, sehingga kemungkinan terjadinya krisis likuiditas yang tiba-tiba dapat diminimalkan. Penelitian Cardillo dan Longo (2020) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengadopsi sistem akrual mengalami peningkatan efektivitas operasional, karena mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang lengkap dan akurat. Hal ini menjadikan proses perencanaan, anggaran, dan pengendalian keuangan lebih efisien dan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Namun, untuk mencapai tingkat efisiensi yang ideal, penerapan sistem akrual perlu didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta pengelolaan manajemen yang baik. Tanpa dukungan teknologi yang solid, pengolahan data akrual yang rumit akan menjadi beban bagi pegawai pemerintah dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga harus diperbaiki melalui pelatihan berkelanjutan agar bisa memahami dan memanfaatkan sistem ini sebaik mungkin. Dengan adanya kerjasama antara teknologi, manajemen, dan kemampuan SDM, efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik berbasis akrual dapat direalisasikan secara nyata.

Keterbandingan Laporan Keuangan. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual juga memberikan dampak positif terhadap keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar instansi pemerintah. Dengan adanya standar pencatatan yang seragam, setiap transaksi keuangan dicatat menggunakan metode yang sama, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan mudah dibandingkan dari tahun ke tahun maupun antar entitas pemerintah (Dokas et al., 2023; Safari et al., 2024). Keterbandingan ini sangat penting dalam proses audit keuangan dan evaluasi kinerja, karena memungkinkan auditor, pengambil kebijakan, dan masyarakat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di berbagai instansi secara objektif.

Selain itu, keterbandingan laporan keuangan memudahkan pemerintah pusat dalam melakukan benchmarking antar daerah, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) serta area yang memerlukan perbaikan. Penelitian Dokas et al. (2023) menegaskan bahwa akuntansi berbasis akrual tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas melalui penyajian data yang dapat diverifikasi dan dibandingkan lintas waktu serta lintas entitas. Hal ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan fiskal yang berbasis data.

Namun, manfaat keterbandingan ini hanya dapat dirasakan secara optimal apabila seluruh entitas pemerintah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual secara konsisten dan disiplin. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan dalam tingkat adopsi dan pemahaman antar instansi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar seluruh pemerintah daerah maupun pusat dapat menerapkan standar akuntansi akrual dengan baik dan seragam. Dengan demikian, keterbandingan laporan keuangan dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan publik di Indonesia.

SIMPULAN

Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik telah terbukti menyajikan berbagai keuntungan signifikan yang mendukung perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah. Metode ini tidak hanya meningkatkan transparansi dengan memberikan data keuangan yang lebih lengkap dan tepat tentang aset, utang, pendapatan, dan pengeluaran, tetapi juga memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan pengelolaan dana publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Data yang dihasilkan melalui akrual menjadi lebih relevan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja pemerintah, sehingga mendukung terbentuknya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Di samping itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Dengan pencatatan yang teratur dan tepat, pemerintah dapat menemukan peluang untuk menghemat serta mengoptimalkan penggunaan aset yang ada, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dana publik yang tersedia. Standar akuntansi akrual juga memungkinkan perbandingan laporan keuangan antara waktu yang berbeda dan antara berbagai entitas pemerintah, yang sangat penting dalam audit, evaluasi kinerja, dan perbandingan antar daerah. Ini mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan di tingkat nasional.

Namun, proses penerapan basis akrual tidak terhindar dari beberapa tantangan yang cukup rumit. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang cukup dalam akuntansi berbasis akrual menjadi salah satu hambatan utama yang perlu segera diatasi. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan sistem akuntansi yang terintegrasi masih belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas. Resistensi dari budaya organisasi dan ketidakpastian dukungan kebijakan dari para pemimpin serta pemangku kepentingan juga menjadi faktor penghalang yang signifikan dalam proses perubahan sistem akuntansi ini.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang strategis dan terorganisir melibatkan berbagai pihak. Pelatihan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar pegawai pemerintah dapat memahami dan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dengan baik. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang handal serta sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga sangat penting untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Di samping itu, manajemen perubahan yang efektif, termasuk sosialisasi dan komunikasi yang intensif, perlu dilakukan untuk meredakan resistensi dan meningkatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual juga menjadi faktor penting bagi keberhasilan. Dukungan dan komitmen penuh dari pemimpin pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan agar implementasi sistem ini dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan serta audit internal dan eksternal yang ketat juga harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standart akuntansi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., & Subardjo, A. (2017). Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*.
- Dua, K. A. (2023). Analisis Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka). *Student Scientific Creatifity Journal (SSCJ)*.
- Erawan, P. A., Santosa, M. S., Budiarta, D. K., & Wahyudi, I. P. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Idrika, M., Mubyarto, N., & Anita, E. (2023). ANALISIS PENGUKURAN VALUE FOR MONEY PADA APBDES DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA SUNGAI BENGKAL BARAT KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO. *Journal of Economics and Business Management*.
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI KASUS PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2014-2016). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

- Matondang, K., Parawanza, A. A., Simanjuntak, J. P., & Tampubolon, Y. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value Of Money Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 Dan 2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*.
- Nurafifah, I. P., Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*.
- Prameswari, M. P., Safitri, R. A., Karima, N., & Gunawan, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*.
- Siregar, H. A. (2018). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money Dalam Konteks New Public Management Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Wahiji, T. R., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.
- Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., Waluyo, A., & Yuliyanto, W. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan "Value For Money" Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas "X" di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*.